



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KOMINFO

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110, Telp./Fax. (021) 3810678, balitbangsdm.kominfo.go.id

Nomor : S-289/BLSDM/LT.02.03/10/2024 Jakarta, 8 Oktober 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Pembukaan Program Beasiswa S2
Kelas Khusus Dalam Negeri Kementerian
Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi membuka Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 untuk skema Kelas Khusus. Program Beasiswa ini ditujukan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah termasuk anggota TNI dan POLRI, serta masyarakat umum dari instansi swasta yang memiliki latar belakang pekerjaan di sektor TIK atau pelaku *startup* lokal.

Pembukaan Pendaftaran Program Beasiswa ini telah dipublikasikan secara resmi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 melalui situs web beasiswa.kominfo.go.id. Adapun program studi yang dibuka adalah:

1. Magister Transformasi Digital, Multidisiplin Smart System (Smart-X) pada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, pendaftaran ditutup pada tanggal **21 Oktober 2024***.
2. Magister Keamanan Siber dan Forensik Digital pada Fakultas Informatika Universitas Telkom, pendaftaran ditutup pada tanggal **31 Oktober 2024***.

**Jadwal dapat berubah kemudian, dapat dicek secara berkala melalui website.*

Informasi selengkapnya terkait persyaratan, prosedur pendaftaran, dan jadwal seleksi penyelenggaraan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo skema Kelas Khusus dapat diakses melalui situs web beasiswa.kominfo.go.id. Adapun persyaratan, prosedur pendaftaran dan informasi lainnya mengenai Perguruan Tinggi tujuan yang diminati dapat dibaca lebih lanjut pada situs resmi masing-masing Perguruan Tinggi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KOMINFO

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110, Telp./Fax. (021) 3810678, balitbangsdm.kominfo.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja untuk dapat menyebarkan informasi ini kepada pegawai di lingkungan instansi masing-masing, mengintegrasikan program ini dalam perencanaan dan pengembangan SDM, serta mengirimkan calon pendaftar bagi pegawai yang berminat mendaftar untuk memilih program studi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Apabila Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja memerlukan keterangan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Program Beasiswa ini, dapat menghubungi Tim Administrasi Pengelola Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo melalui *email* beasiswadn@mail.kominfo.go.id, atau melalui Helpdesk: 0857-6000-8994 (hanya pesan *WhatsApp*), serta media sosial Instagram: @beasiswa.kominfo.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai Laporan)
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo
3. Sekretaris Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran : Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo
Nomor : S-289/BLSDM/LT.02.03/10/2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

PERSYARATAN BEASISWA S2 DALAM NEGERI KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2024 SKEMA KELAS KHUSUS

Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 skema Kelas Khusus kembali dibuka bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/POLRI dan non-PNS dari Kementerian/LPNK/BUMN/Swasta dengan latar belakang pekerjaan bidang TIK yang berminat untuk melanjutkan studi Magister di bidang studi terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program studi Dalam Negeri dapat ditempuh di 2 (dua) Perguruan Tinggi yang menjadi mitra kerjasama Kementerian Kominfo dalam penyelenggaraan Program Beasiswa.

A. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa ini adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Pernah/sedang bekerja dan memiliki masa kerja minimum 2 tahun (kumulatif) pada saat melamar (Dibuktikan dengan SK CPNS/PNS/dokumen serupa lainnya bagi PNS/TNI/POLRI dan Surat Keterangan Kerja bagi pelamar umum);
3. Tidak ditujukan bagi pelamar yang berprofesi sebagai dosen;
4. Memiliki golongan minimal III/a (3A) bagi PNS;
5. Berusia maksimum 42 tahun pada saat mendaftarkan diri;
6. Belum memiliki gelar Magister/ S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan Magister/S2;
7. Lulusan S1/DIV dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.80 dari skala 4.00;
8. Menyusun Rencana Tugas Akhir yang relevan dengan pengembangan transformasi digital nasional (500 - 1000 kata);
9. Menyusun Essay yang berisi Personal statement dan Rencana kontribusi pasca studi, khususnya kontribusi bagi pengembangan transformasi digital nasional (500 - 1000 kata);
10. Menyertakan surat rekomendasi dari pimpinan/dosen pembimbing/atau tokoh lain yang memiliki kredibilitas dan diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun pada bulan yang sama dengan pendaftaran (template surat rekomendasi bisa diunduh pada tautan berikut https://komin.fo/template_bk2024);
11. Mendapatkan surat izin pimpinan yang berwenang dari tempat bekerja untuk menjalani pendidikan (Lampiran III);
12. Diutamakan bagi yang sudah memiliki *Letter of Acceptance* (LoA) dari Perguruan Tinggi mitra Kominfo;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

13. Bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya, melampirkan:

- Hasil penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui laman <https://piln.kemdikbud.go.id/> atau Kementerian Agama melalui laman <https://diktis.kemenag.go.id/penyetaraanijazah/>
- Hasil konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui laman <https://piln.kemdikbud.go.id/> atau Kementerian Agama melalui laman <https://diktis.kemenag.go.id/penyetaraanijazah/>
- Tangkapan layar ajuan penyetaraan ijazah dan/atau konversi IPK pada laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama mengenai penyetaraan ijazah dan/atau konversi IPK bagi pendaftar yang penyetaraan ijazah dan/atau konversi IPK-nya belum terbit.

14. Pelamar tetap harus memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh mitra perguruan tinggi yang dipilih.

B. Persyaratan Tambahan bagi PNS, TNI/POLRI dalam Program Beasiswa S2 Dalam Negeri adalah:

1. Mendapatkan surat izin dari pejabat berwenang (Minimal Eselon II atau Kepala Kantor) untuk menjalankan pendidikan sesuai dengan ketentuan masing-masing Instansi (Lampiran I);
2. Tugas dan fungsinya dalam pekerjaan berkaitan dengan salah satu program studi yang akan ditempuh, yakni pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Keamanan Informasi, penyusunan strategi dan kebijakan bidang digital serta peningkatan daya saing nasional dalam sektor ekonomi digital;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Memenuhi persyaratan penetapan tugas belajar sebagaimana dimaksud SE MENPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

C. Program studi yang dibiayai melalui Program Beasiswa ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Program Studi di 2 (dua) Perguruan Tinggi sebagai berikut:

No.	Universitas	Program Studi	Persyaratan Masuk Perguruan Tinggi
1.	Institut Teknologi Bandung	Magister Transformasi Digital, Multidisiplin Smart System (Smart-X)	https://admission.itb.ac.id/info/program-magister/
2.	Universitas Telkom	Magister Kemanan Siber dan Forensik Digital	https://smb.telkomuniversity.ac.id/jalur-seleksi/beasiswa-kominfo/

1. Dokumen persyaratan

Dokumen persyaratan yang harus diunggah portal website Beasiswa Kominfo beasiswa.kominfo.go.id, sebagai berikut:

1. Pendaftar dari PNS/TNI/POLRI:

- 1) SK CPNS;
- 2) SK PNS;
- 3) SK Terbaru/ Pangkat Terakhir;
- 4) Ijazah & Transkrip Nilai S1;
- 5) Daftar Riwayat Hidup;
- 6) Surat Izin Atasan dari pimpinan untuk melanjutkan pendidikan tingkat pascasarjana (ditandatangani dengan meterai/e-meterai 10.000 sesuai dengan format Lampiran I);
- 7) Surat rekomendasi dari pimpinan/akademisi/tokoh kredibilitas di bidangnya dan mengenal pelamar dengan baik (sesuai dengan format Lampiran II);
- 8) Rencana Tugas Akhir yang sesuai dengan Pengembangan Transformasi Digital Nasional (500 - 1000 kata);
- 9) *Essay* yang berisi personal statement dan rencana kontribusi pasca studi, khususnya kontribusi bagi pengembangan transformasi digital Indonesia (500 - 1000 kata);
- 10) Pemenuhan persyaratan relevansi tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih, bagi PNS/TNI/Polri dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ) /Surat Keputusan /Surat Tugas yang menyatakan yang bersangkutan tugas dan fungsinya pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi/ Pengelolaan TIK /Keamanan Informasi, dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah

menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing instansi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait;

- 11) Dokumen lainnya: dapat diisi dengan dokumen yang mendukung atau dokumen yang mendukung tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih (apabila dokumen yang dilampirkan lebih dari 1, mohon untuk dapat digabung dalam 1 dokumen PDF);
- 12) Surat keterangan lulus penerimaan dari Perguruan Tinggi pilihan.

2. Pendaftar non PNS/TNI/POLRI:

- 1) Daftar riwayat hidup;
- 2) Surat Keterangan Kerja;
- 3) Ijazah & Transkrip Nilai S1;
- 4) Surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh kredibilitas di bidangnya dan mengenal pelamar dengan baik (sesuai dengan format Lampiran II);
- 5) Rencana Tugas Akhir yang sesuai dengan Pengembangan Transformasi Digital Nasional (500 - 1000 kata);
- 6) *Personal statement* (500 - 1000 kata);
- 7) Rencana kontribusi pasca studi, khususnya kontribusi bagi pengembangan transformasi digital Indonesia (500 - 1000 kata);
- 8) Pemenuhan persyaratan relevansi tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih, dibuktikan dengan dokumen lainnya yang mendukung tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih (apabila dokumen yang dilampirkan lebih dari 1, mohon untuk dapat digabung dalam 1 dokumen PDF); dan
- 9) Surat keterangan lulus penerimaan dari Perguruan Tinggi pilihan.

3. Alur Pendaftaran

- 1) Mendaftar secara daring melalui situs Pendaftaran Beasiswa Kementerian Kominfo: <https://beasiswa.kominfo.go.id/>;
- 2) Pastikan melengkapi prosedur pendaftaran dengan memiliki akun Digital Talent Scholarship (DTS) terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pembuatan akun pada laman website Beasiswa Kominfo;
- 3) Pastikan data diri telah tervalidasi pada akun Digital Talent Scholarship (DTS) untuk menghindari data tidak tersimpan sempurna;
- 4) Melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan melalui laman pendaftaran;
- 5) Pastikan dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, atau yang sejenis diterbitkan pada tahun 2024 dan sesuai ketentuan Beasiswa Kominfo;
- 6) Peserta mendaftar pada perguruan tinggi yang dipilih. Jadwal Seleksi Masuk Mitra Perguruan Tinggi Kementerian Kominfo dapat diakses pada masing-masing situs resmi penerimaan mitra Perguruan Tinggi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4. Tahapan Seleksi:

1) Seleksi Administrasi

Data dan dokumen yang telah dilengkapi dan diunggah oleh pelamar melalui website beasiswa akan diverifikasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;

2) Proses Perguruan Tinggi

a. Telah memiliki LoA

Para pelamar mengajukan pendaftaran beasiswa langsung kepada salah satu Perguruan Tinggi pilihan, dengan melakukan pendaftaran daring serta mengirimkan dokumen persyaratan melalui website beasiswa.kominfo.go.id. Para pelamar yang telah memiliki LoA dan masih berlaku dapat berkoordinasi dengan pengelola beasiswa pada tiap prodi perguruan tinggi untuk mendaftarkan diri dan dipertimbangkan sebagai salah satu *short list* pada program Beasiswa S2 Kemenkominfo.

b. Belum memiliki LoA

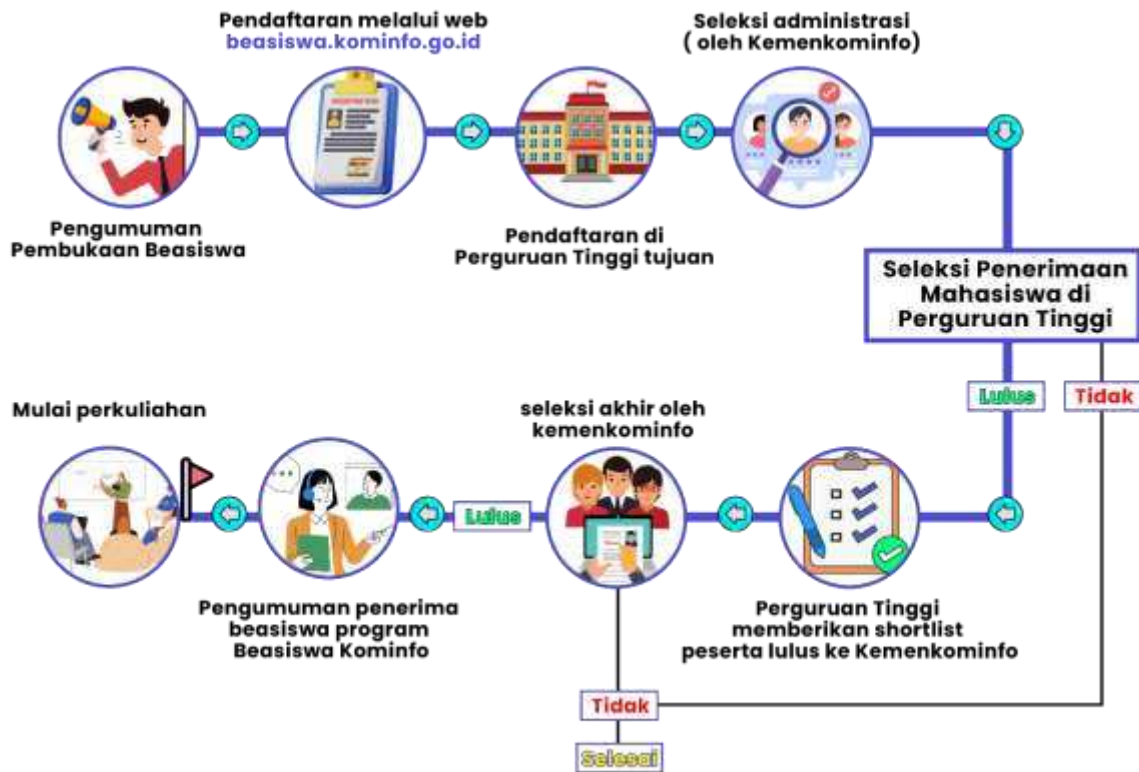
Para pelamar mengajukan pendaftaran beasiswa langsung kepada salah satu Perguruan Tinggi pilihan, dengan melakukan pendaftaran daring serta mengirimkan berkas-berkas persyaratan melalui website beasiswa.kominfo.go.id. Selanjutnya setiap pelamar harus mengikuti ujian saringan masuk atau tes seleksi yang diadakan oleh Perguruan Tinggi sesuai kalender akademik masing-masing. Tes seleksi mahasiswa dapat terdiri atas Tes Potensi Akademik, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Tes kemampuan TIK, maupun Tes Wawancara berdasarkan ketentuan dan standar penerimaan mahasiswa yang berlaku di masing-masing Perguruan Tinggi.

3. Pengumuman

Penetapan Penerima Beasiswa Kementerian Kominfo akan disampaikan secara resmi melalui akun masing-masing pada portal website Beasiswa Kominfo dan email.

Jadwal Seleksi Masuk Mitra Perguruan Tinggi Kementerian Kominfo Tahun 2024 dapat diakses pada masing-masing situs resmi penerimaan mitra Perguruan Tinggi atau *website* Beasiswa Kominfo pada beasiswa.kominfo.go.id.

5. Alur Pendaftaran Beasiswa Dalam Negeri Skema Kelas Khusus



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN BEASISWA KOMINFO

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Lembaga :
No. Telp/Handphone :
E-mail :

Memberi rekomendasi kepada :
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Deskripsi Rekomendasi:

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Perekomendasi)

(_____)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Surat Izin Atasan untuk Pelamar PNS/TNI/POLRI

KOP INSTANSI

SURAT IZIN ATASAN

No.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Memberikan izin untuk mengikuti seleksi Program Beasiswa S2 Kelas Khusus Dalam Negeri Kementerian Kominfo bagi salah satu pegawai kami berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Pegawai dimaksud benar merupakan pegawai (Nama instansi/satuan kerja)* yang memiliki tugas yang berkaitan dengan (dilengkapi dengan tugas dan fungsi bidang pekerjaan saat ini)* pada instansi kami dan telah Memenuhi persyaratan penetapan tugas belajar sebagaimana dimaksud SE MENPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan. Keikutsertaan pegawai dimaksud pada Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan peta pengembangan kompetensi pegawai pada instansi kami dan nantinya akan ditempatkan/ditugaskan sesuai dengan ilmu dan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan program studi yang akan ditempuh.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk memenuhi kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk proses seleksi pada Program Beasiswa S2 Kelas Khusus Dalam Negeri Bidang Komunikasi dan Informatika Kementerian Kominfo tahun 2024.

Kota Domisili, tanggal, Bulan, Tahun
Ttd dan cap instansi

(Nama Pejabat Penandatanganan)

Keterangan:

*Disesuaikan dengan kondisi pelamar

Surat Izin Atasan Pelamar Umum

KOP INSTANSI

SURAT IZIN ATASAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :
Telepon :
E-mail :

Dengan ini memberikan izin kepada pegawai berikut untuk mengikuti proses seleksi Program Beasiswa S2 Kelas Khusus Dalam Negeri Kementerian Kominfo dan untuk menempuh studi ***apabila dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa*** Kementerian Kominfo:

Nama :
NIK :
Jabatan :

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Domisili, tanggal, Bulan, Tahun
Ttd dan cap instansi

(Nama Pejabat Penandatanganan)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

Lampiran : Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo
Nomor : S-289/BLSDM/LT.02.03/10/2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

Daftar Lampiran

I. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Pengembangan SDM

2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

3. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

4. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM

5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Pengembangan SDM dan ESDM

7. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Pengembangan SDM Industri

8. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan

9. Kementerian Sosial Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
- b. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

10. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

12. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan

13. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan

14. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Pengembangan SDM

16. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Indonesia
- b. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

17. Kementerian Agama Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

18. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

20. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Kementerian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

b. Staf Ahli Bidang SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

21. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

a. Sekretaris Kementerian

b. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

22. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

a. Sekretaris Kementerian

23. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

a. Sekretaris Kementerian

b. Kepala Deputi Bidang Koordinasi SDM

24. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

a. Sekretaris Kementerian

b. Deputi Bidang Administrasi Aparatur

25. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

a. Sekretaris Kementerian

b. Deputi Bidang Pengembangan SDM

26. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

a. Sekretaris Kementerian

27. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

a. Sekretaris Kementerian

b. Deputi Bidang SDM Aparatur

28. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

a. Sekretaris Kementerian

b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

a. Sekretaris Utama

b. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

a. Sekretaris Kementerian

b. Deputi Manajemen SDM Eksekutif

31. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

a. Sekretaris Kementerian

32. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

- a. Sekretaris Kementerian Pariwisata Indonesia
- b. Deputi Pengembangan SDM Aparatur

33. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan
- b. Kepala Biro Kepegawaian

34. Arsip Nasional Republik Indonesia

- a. Sekretaris Utama

35. Badan Kepegawaian Negara

- a. Sekretaris Umum

36. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

- a. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- b. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

37. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Direktur Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

38. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- a. Sekretaris Utama
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangagn Pengawasan

39. Lembaga Administrasi Negara

- a. Sekretaris Utama
- b. Deputi Diklat Aparatur

40. Markas Besar Kepolisian Negara RI

- a. Sekretaris Utama Mabes Polri
- b. Deputi SDM

41. Markas Besar Tentara Negara Indonesia (TNI)

- a. Sekretaris Komandan TNI

42. Badan Koordinasi Penanaman Modal

- a. Sekretaris Utama

43. Badan Informasi Geospasial

- a. Sekretaris Utama

44. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

- a. Sekretaris Utama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- 45. Badan Pembinaan Hukum Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 46. Badan Pengawasan Obat dan Makanan**
 - a. Sekretaris Utama
- 47. Badan Pengawas Tenaga Nuklir**
 - a. Sekretaris Utama
- 48. Badan Standarisasi Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 49. Badan Urusan Logistik**
 - a. Sekretaris Uama
 - b. Direktur SDM dan Umum
- 50. Badan Pusat Statistik**
 - a. Sekretaris Utama
- 51. Badan Narkotika Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 52. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**
 - a. Sekretaris Utama
- 53. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 54. Badan Intelijen Negara**
 - a. Sekretaris Utama
- 55. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)**
 - a. Sekretaris Utama
- 56. Badan Siber dan Sandi Negara**
 - a. Sekretaris Utama
- 57. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan**
 - a. Sekretaris Utama
- 58. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 59. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 60. Komisi Pemberantasan Korupsi**
 - a. Sekretaris Jenderal
- 61. Komisi Penyiaran Indonesia**
 - a. Sekretaris KPI Pusat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

62. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

- a. Sekretaris Jenderal

63. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- a. Sekretaris Utama

64. Badan Kemanan Laut

- a. Sekretaris Utama

I. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
2. Kepala BPSDM Provinsi Aceh
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireun
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeuleu
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
21. Sekretaris Daerah Kota Sabang
22. Sekretaris Daerah Kota Langsa
23. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
24. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
25. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

SUMATERA UTARA

26. Sekretaris Provinsi Sumatera Utara
27. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
29. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
30. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
31. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
32. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu
33. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
34. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun
35. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
36. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir
37. Sekretaris Daerah Kabupaten Pak Pak Barat
38. Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
39. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
40. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
41. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan
42. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanulu Tengah
43. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal
44. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
45. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
46. Sekretaris Daerah Kota Binjai
47. Sekretaris Daerah Kota Sibolga
48. Sekretaris Daerah Kota Medan
49. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar
50. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
51. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidempuan
52. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai

SUMATERA BARAT

53. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
54. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat
55. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
56. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

57. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman
58. Sekretaris Daerah Kabupaten Kep. Mentawai
59. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam
60. Sekretaris Daerah Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
61. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
62. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
63. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
64. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
65. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmas Raya
66. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
67. Sekretaris Daerah Kota Padang
68. Sekretaris Daerah Kota Sawah Lunto
69. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
70. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
71. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi
72. Sekretaris Daerah Kota Solok
73. Sekretaris Daerah Kota Pariaman

RIAU

74. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
75. Kepala BPSDM Provinsi Riau
76. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar
77. Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkalis
78. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
79. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
80. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
81. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
82. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
83. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
84. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan
85. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
86. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
87. Sekretaris Daerah Kota Dumai

SUMATERA SELATAN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

88. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
89. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
90. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
91. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
92. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
93. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
94. Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat
95. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
96. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin
97. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
98. Sekretaris Daerah Kota Ogan Komering Ulu Selatan
99. Sekretaris Daerah Kota Ogan Komering Ulu Timur
100. Sekretaris Daerah Kota Palembang
101. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
102. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
103. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau

KEPULAUAN RIAU

104. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
105. Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
106. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
107. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun
108. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
109. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga
110. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang
111. Sekretaris Daerah Kota Batam

JAMBI

112. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
113. Kepala BPSDM Provinsi Jambi
114. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
115. Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari
116. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
117. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
118. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

119. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
120. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
121. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
122. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
123. Sekretaris Daerah Kota Jambi

BENGGULU

124. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
125. Kepala BPSDM Provinsi Bengkulu
126. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
127. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
128. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
129. Sekretaris Daerah Kabupaten Muko – Muko
130. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
131. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
132. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
133. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
134. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu

BANGKA BELITUNG

135. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung
136. Kepala BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung
137. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
138. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
139. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
140. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
141. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
142. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
143. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang

LAMPUNG

144. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
145. Kepala BPSDM Provinsi Lampung
146. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
147. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

148. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
149. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
150. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
151. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
152. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
153. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
154. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
155. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
156. Sekretaris Daerah Kota Metro

BANTEN

157. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
158. Kepala BPSDMD Provinsi Banten
159. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
160. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
161. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
162. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
163. Sekretaris Daerah Kota Tangerang
164. Sekretaris Daerah Kota Cilegon
165. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
166. Sekretaris Daerah Kota Serang

DKI JAKARTA

167. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
168. Kepala BPSDM Provinsi
169. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Pusat
170. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Utara
171. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Timur
172. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Selatan
173. Sekretaris Daerah Kota Jakarta Barat
174. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu

JAWA BARAT

175. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

176. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat
177. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
178. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
179. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
180. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu
181. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
182. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
183. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang
184. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
185. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
186. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis
187. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
188. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
189. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
190. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut
191. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
192. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
193. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya
194. Sekretaris Daerah Kota Cirebon
195. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi
196. Sekretaris Daerah Kota Bogor
197. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
198. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
199. Sekretaris Daerah Kota Bandung
200. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
201. Sekretaris Daerah Kota Banjar
202. Sekretaris Daerah Kota Depok

JAWA TENGAH

203. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
204. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
205. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
206. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
207. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
208. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

209. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
210. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
211. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
212. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
213. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
214. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
215. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
216. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
217. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
218. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
219. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
220. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
221. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
222. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
223. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
224. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
225. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
226. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
227. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
228. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali
229. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
230. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
231. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
232. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
233. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
234. Sekretaris Daerah Kota Semarang
235. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
236. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
237. Sekretaris Daerah Kota Tegal
238. Sekretaris Daerah Kota Magelang
239. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

240. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
241. Kepala Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

242. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
243. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
244. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul
245. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
246. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

JAWA TIMUR

247. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
248. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur
249. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
250. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
251. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
252. Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
253. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
254. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
255. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
256. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
257. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan
258. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
259. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
260. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
261. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
262. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
263. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
264. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
265. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
266. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
267. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
268. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
269. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
270. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
271. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
272. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
273. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
274. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

275. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban
276. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
277. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
278. Sekretaris Daerah Kota Madiun
279. Sekretaris Daerah Kota Kediri
280. Sekretaris Daerah Kota Blitar
281. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
282. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
283. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
284. Sekretaris Daerah Kota Batu
285. Sekretaris Daerah Kota Malang
286. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

BALI

287. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
288. Kepala BKPSDM Provinsi Bali
289. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
290. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
291. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
292. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
293. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
294. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
295. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
296. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
297. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

NUSA TENGGARA BARAT

298. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
299. Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat
300. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur
301. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
302. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
303. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
304. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
305. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 306. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima
- 307. Sekretaris Daerah Kota Mataram
- 308. Sekretaris Daerah Kota Bima

NUSA TENGGARA TIMUR

- 309. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 310. Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 311. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka
- 312. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 313. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
- 314. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu
- 315. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang
- 316. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende
- 317. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
- 318. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai
- 319. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- 320. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur
- 321. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
- 322. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
- 323. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
- 324. Sekretaris Daerah Kota Kupang

MALUKU

- 325. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
- 326. Kepala BPSDM Provinsi Maluku
- 327. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru
- 328. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan
- 329. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
- 330. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
- 331. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah
- 332. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
- 333. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 334. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
- 335. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 336. Sekretaris Daerah Kota Ambon
- 337. Sekretaris Daerah Kota Tual

MALUKU UTARA

- 338. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
- 339. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara
- 340. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- 341. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
- 342. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara
- 343. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 344. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
- 345. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
- 346. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai
- 347. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu
- 348. Sekretaris Daerah Kota Ternate
- 349. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan

KALIMANTAN BARAT

- 350. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 351. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat
- 352. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
- 353. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- 354. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Lor
- 355. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
- 356. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
- 357. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak
- 358. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi
- 359. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak
- 360. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
- 361. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
- 362. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
- 363. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
- 364. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
- 365. Sekretaris Daerah Kota Singkawang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KALIMANTAN TENGAH

366. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
367. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
368. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
369. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
370. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
371. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
372. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
373. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
374. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotowaringin Barat
375. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotowaringin Timur
376. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
377. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya
378. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
379. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
380. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
381. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya

KALIMANTAN SELATAN

382. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
383. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan
384. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
385. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
386. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
387. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
388. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
389. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
390. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru
391. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
392. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
393. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
394. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
395. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
396. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KALIMANTAN TIMUR

- 397. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 398. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur
- 399. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
- 400. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat
- 401. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 402. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
- 403. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
- 404. Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Paser
- 405. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 406. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
- 407. Sekretaris Daerah Kota Bontang
- 408. Sekretaris Daerah Kota Samarinda

KALIMANTAN UTARA

- 409. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 410. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
- 411. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
- 412. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
- 413. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
- 414. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
- 415. Sekretaris Daerah Kota Tarakan

SULAWESI SELATAN

- 416. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 417. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
- 418. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
- 419. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
- 420. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
- 421. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
- 422. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto
- 423. Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
- 424. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- 425. Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang
- 426. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang

427. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan
428. Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar
429. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
430. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
431. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru
432. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
433. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
434. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
435. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
436. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
437. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba
438. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
439. Sekretaris Daerah Kota Makassar
440. Sekretaris Daerah Kota Parepare
441. Sekretaris Daerah Kota Palopo

SULAWESI UTARA

442. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
443. Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara
444. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
445. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
446. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
447. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
448. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
449. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
450. Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe
451. Sekretaris Daerah Kota Manado
452. Sekretaris Daerah Kota Tomohon
453. Sekretaris Daerah Kota Bitung
454. Sekretaris Daerah Kabupaten Siao Tagulandang Biaro

SULAWESI TENGAH

455. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
456. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah
457. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

458. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
459. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
460. Sekretaris Daerah Kabupaten Toli Toli
461. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong
462. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
463. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
464. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
465. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una Una
466. Sekretaris Daerah Kota Palu

SULAWESI TENGGARA

467. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
468. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara
469. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna
470. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
471. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan
472. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
473. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
474. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi
475. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara
476. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana
477. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara
478. Sekretaris Daerah Kota Kendari
479. Sekretaris Daerah Kota Baubau

SULAWESI BARAT

480. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
481. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat
482. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene
483. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
484. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa
485. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
486. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara

GORONTALO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 487. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
- 488. Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo
- 489. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
- 490. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
- 491. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
- 492. Sekretaris Daerah Kabupaten Pahuwato
- 493. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo

PAPUA

- 494. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
- 495. Kepala BPSDM Provinsi Papua
- 496. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
- 497. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke
- 498. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
- 499. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire
- 500. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
- 501. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
- 502. Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen
- 503. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi
- 504. Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom
- 505. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel
- 506. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi
- 507. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
- 508. Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori
- 509. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor
- 510. Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen
- 511. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
- 512. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- 513. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara
- 514. Sekretaris Daerah Kota Jayapura

PAPUA BARAT

- 515. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
- 516. Kepala BPSDMD Provinsi Papua Barat
- 517. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 518. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari
- 519. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana
- 520. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama
- 521. Sekretaris Daerah Kabupaten Fak Fak
- 522. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
- 523. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
- 524. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
- 525. Sekretaris Daerah Kota Sorong

PAPUA SELATAN

- 526. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan
- 527. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Selatan
- 528. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke
- 529. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi
- 530. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
- 531. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel

PAPUA TENGAH

- 532. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- 533. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire
- 534. Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai
- 535. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
- 536. Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai
- 537. Sekretaris Daerah Kabupaten Deyiai
- 538. Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya
- 539. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak
- 540. Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya

PAPUA PEGUNUNGAN

- 541. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan
- 542. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan
- 543. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
- 544. Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya
- 545. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
- 546. Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 547. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara
- 548. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- 549. Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo
- 550. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

PAPUA BARAT DAYA

- 551. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- 552. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya
- 553. Sekretaris Daerah Kota Sorong
- 554. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
- 555. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan
- 556. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
- 557. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw
- 558. Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**